

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan. Setiap organisasi membutuhkan tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Untuk mencapainya tujuan tersebut, setiap organisasi harus memiliki visi, misi, dan strategi untuk mencapainya. Salah satu cara untuk melihat apakah tujuan dan rencana telah tercapai dengan menggunakan pengukuran kinerja dalam organisasi.

Kinerja sektor publik saat ini menjadi sorotan masyarakat karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Orang sering berfikir bahwa organisasi sektor publik adalah tempat yang boros, merugi, oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran kinerja organisasi sektor publik agar publik tidak mengakui pemerintah sebagai tempat pemborosan uang.

Pengukuran kinerja berperan penting dalam mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Mengukur keberhasilan memiliki tiga tujuan. Pertama, indikator kinerja utama dirancang untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintahan. Kedua, pengukuran sektor publik untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pengukuran daya pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi.

Kelembagaan (Mardiasmo,2009:121). Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja sebuah organisasi agar mengetahui apakah pemerintah mempunyai kinerja yang baik atau malah sebaliknya.

Mardiasmo (2009:4) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* tidak hanya berfokus pada sisi finansial tetapi juga pada didasarkan pada konsep manajemen berdasarkan tiga faktor : Hal ini terkait dengan tingkat biaya yang dikeluarkan saat melakukan atau mengambil aktivitas, dengan mempertimbangkan input yang digunakan yaitu:

1. Efisiensi, mengacu pada hubungan antara barang yang diproduksi dan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk menghasilkan layanan (*output*) dan *output*, disebut efisiensi bila dapat menghasilkan *output* dengan input yang dapat menghasilkan *input* terkecil atau *output* terbesar.
2. Efektivitas, terkait dengan membandingkan hasil dan keluaran. Efektivitas sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Surve dilakukan di Kantor Pertanahan kabupaten Mojokerto.
3. Ekonomis, berkaitan dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan atau untuk memperoleh sesuatu mengingat *input* yang digunakan.

Survey dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas megurusi di bidang pertanahan dan bertanggung jawab mendukung diwilayahnya.

Peneliti menggunakan metode *Value For Money* sebagai alat pengukuran kinerja untuk Kantor Pertanahan hal ini sejalan dengan misi yaitu:

1. Menkuatkan kepercayaan masyarakat dengan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Mempercepat penyelesaian perkara-perkara yang ada sekaligus meminimalisir timbulnya masalah baru.
3. Melaksanakan penataan kawasan tanpa paksaan.
4. Mengembangkan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi agar lebih mudah murah dan terbebas calo.
5. Memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan redistribusi tanah dan kegiatan pensertifikatan lainnya.

Peranan Kantor Pertanahan dalam mencapai misi, tujuan pengelolaan pertanahan tidak bisa diabaikan. Pengeluaran atau belanja pemerintah daerah untuk kegiatan baik penyelenggarakan pengelolaan Kantor pertanahan maupun pengabdian kepada masyarakat didanai melalui APBD dan memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Peneliti menerapkan prinsip *Value For Money* artinya ekonomis (Hemat cermat) dalam pengalokasian sumber daya, serta selektif (berhasil guna) dalam arti mencapai sebuah tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2009:130).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pengukuran kinerja menggunakan metode *Value For Money*. Berdasarkan survei sebelumnya, Anggi

(2020) melaporkan bahwa hasil kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu tahun 2017-2019 terbilang efisien dan efektif. Sedangkan menurut penelitian sebelumnya, Mistina (2015) belum berhasil dalam mengelola keuangannya, menemukan bahwa hasil kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Keuangan Daerah dari tahun 2011 hingga 2013 menunjukkan skala ekonomi yang cukup baik dan efisiensi rata-rata. Itu efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, jelaslah bahwa pengukuran kinerja sangat penting dan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Bersamaan dengan itu, peneliti akan menggunakan judul **“PENGUKURAN KINERJA MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO“**

### **1.2 Tujuan Studi Lapangan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yang diukur menggunakan Metode *Value For Money* dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat yang diperoleh dari studi lapang ini antara lain :

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik.

- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik terutama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

## 2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto

- a. Memberikan informasi kinerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto dan sekaligus sebagai evaluasi agar pelaksanaan/kegiatan kedepannya dapat terlaksana dengan lancar ekonomis, efisien dan efektif.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi mengenai alat untuk mengukur kinerja yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapangan**

Ruang lingkup studi lapangan meliputi pembahasan mengenai pengukuran kinerja yang ditentukan adalah periode tahun 2019 sampai dengan 2021, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto sebagai sumber dengan menggunakan metode *Value For Money* sebagai alat ukur kinerja.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan pertanyaan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian

(Suyoto, 2013:22). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mewancarai salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto yaitu kepala bidang akuntansi.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber pengumpulan data dengan cara mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan objek tersebut dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah berupa sumber tertulis yaitu Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 sampai dengan 2021.

